

Term of Reference

DIKLAT POLITIK

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah



diklat
Politik
Nasional
4-8 Februari 2015

PERAN REKONSILIASI KEBANGSAAN
DALAM MENEGUHKAN KEDAULATAN PANCASILA

4-8 Februari 2015

Pimpinan Cabang
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Malang Raya

I. Latar Belakang

Negara-negara di dunia masih mendasarkan prospek politiknya kepada berbagai ideologi politik yang dianut masing masing, berbagai ideologi politik yang ada di rumuskan dalam bentuk isme-isme seperti kapitalisme komunisme sosialisme dan lain sebagainya. Pancasila sebagai mendasarkan dirinya dari kebudayaan dan sifat bangsa indonesia yaitu kekeluargaan dan bukan dari konsep beberapa pemikir. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi sebagaimana dengan negara lain maka demokrasi di Indonesia mendasarkan dirinya kepada ideologi politik yang dipunyai yaitu pancasila dengan kata lain yaitu demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila dalam penjabarannya ke dalam bentuk nilai nilai politik dipengaruhi oleh aspek aspek kebudayaan politik yaitu nilai kekeluargaan dan gotong royong yang terdapat di seluruh etnis/kelompok adat istiadat di seluruh tanah air dan variasi kebudayaan politik oleh sub culture di seluruh tanah air.

Tumbangnya rezim Orde Baru, membawa angin segar bersukacita atas kehadiran demokrasi dan memuji Indonesia sebagai negara demokrasi baru. Meski tidak sepenuhnya terbuka secara lebar sebab sisa-sisa Orde Baru dan Militer hendak bangkit kembali. Dan upaya tarik menarik agar ruang demokrasi terbuka seluas-luasnya terjadi antara sisa Orba dan Militer disatu sisi melawan kelompok Demokratik. Ruang Demokrasi tersebut masih terbuka-meski tidak sepenuhnya dan masih sering diganggu oleh kelompok milisi sipil reaksioner yang menjadi kaki tangan Sisa Orba dan Militer. Tapi ruang demokrasi ini masih sangat formal dan proseduralis, dominan dengan politik elit dan tuntutan Imperialisme bukan dalam

perspektif demokrasi seluasnya dan kesejahteraan sebagai syarat membangun bangsa seutuhnya. Terlepas seperti itu situasinya, capaian-capaian hari ini merupakan hasil jerih payah perjuangan bertahun-tahun untuk membuka ruang demokrasi yang sebelumnya tertutup rapat. Fakta tersebut adalah salah apabila tidak memanfaatkan ruang demokrasi (democratic space) atau justru meninggalkannya. Sebab, mungkin ruang demokrasi yang sudah terbuka saat ini (meski memiliki batasan) akan menyempit karena bangkitnya kekuatan sisa Orba dan Militer yang anti demokrasi.

Sementara saat ini, kita bisa mengamati Perkembangan sejak setelah pilpres yang dinamis, dimana hanya ada dua pasangan calon yang memiliki pendukung yang fanatik dan jumlahnya berimbang. Membentuk Polarisasi yang masih dinamis hingga saat ini, merupakan dampak dari perkembangan demokrasi di tanah air ini. Sebenarnya sampai taraf tertentu, polarisasi, terutama yang didasari ideologi dan platform politik yang jelas, dapat membawa dampak positif bagi demokrasi di Indonesia. Pasangan calon yang tidak terpilih beserta koalisi pendukungnya akan menjadi penyeimbang bagi pemerintahan baru. Dengan terpolarisasinya kekuatan politik pada dua kubu, akan ada yang menjadi oposisi. Yang perlu dijaga ialah hasil pilpres tak memicu konflik politik seperti terjadi di Thailand. Perseteruan politik berkepanjangan tidak hanya akan membuat demokratisasi stagnan dan, jika memicu konflik ataupun kisruh, akan membuka jalan bagi munculnya kelompok yang mungkin menggunakan tangan besi demi menciptakan kestabilan. Kekhawatiran akan munculnya rezim otoriter akibat

perseteruan politik antar dua kubu dapat dipahami. Akan tetapi, selama salah satu kelompok tak tergiur mengubah konstitusi yang telah memberikan rambu-rambu yang tegas untuk pembatasan masa jabatan, desentralisasi, sistem pemilu yang terbuka, jaminan berkumpul, dan berserikat, polarisasi antar kubu pemerintah dan oposisi niscaya akan membawa dampak positif bagi demokrasi di Indonesia.

Dinamika politik dengan polarisasi yang demikian rupa, jika tidak dikawal dengan bijak akan menjadi bumerang, Penggunaan propaganda dan tindak psikologis perang urat saraf, secara terencana dengan tujuan utama mempengaruhi opini, emosi, sikap, dan perilaku kelompok musuh asing sedemikian rupa untuk mendukung ketercapaian tujuan nasional. Paul M.A. Lineberger (diadaptasi dari Effendy, 2002: 161) membagi pengertian perang urat syaraf secara sempit dan luas. Secara sempit, perang urat syaraf adalah: 'Penggunaan propaganda untuk melawan musuh, yang dibarengi tindakan-tindakan operasional dalam bidang militer, ekonomi, atau politik yang dibutuhkan untuk melengkapi propaganda'. Secara luas, perang urat syaraf adalah: 'Penerapan ilmu psikologi untuk memperkuat upaya tindakan politik, ekonomi, atau militer, dan hal itu tentu bermasalah bagi keberlangsungan kehidupan bangsa yang penduduknya sangat plural.

Dalam hal ini IMM musti memerankan diri sebagai aktor pendidikan value dan pluralis-egaliter. Dengan tetap menjaga konsistensi, menyadari sepenuh hati akan urgensi perdamaian, menyusun strategi dan jaringan kerja yang luas maka perwujudan nilai pluralis yang akan dapat menciptakan kehidupan indonesia yang harmonis. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Piet Khaidir (340:2006)

dalam Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial “Kaum muda perlu menjadikan dirinya sebagai lingkaran belajar komunitas (community learning circle) yang tajam dalam kepekaan menganalisis dan tangkas dalam merajutnya menjadi sistem advokasi masyarakat. Dengan kata lain, sebagai aktor pendidikan pluralis, kaum muda perlu memosisikan dirinya menjadi katalisator dan bahkan pelopor sikap-sikap toleran yang menghargai setiap keragaman.

Sebagai anak kandung Muhammadiyah, IMM juga merupakan gerakan da'wah di kalangan mahasiswa. Politik juga merupakan gerakan da'wah. Meskipun Murray Bookchin (1984) membedakan politik menjadi dua yaitu politik kerakyatan dengan politik partai. Politik kerakyatan lebih dekat dan aman dalam melakukan da'wah. Melalui politik kerakyatan atau politik kebangsaan IMM bisa mempertahankan idealisme organisasi untuk senantiasa berpihak kepada rakyat dan kebenaran, misalnya dengan mengkritisi kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang (tentu saja dengan cara yang santun dan ilmiah, misalnya dengan mendengar pendapat dan memberikan solusi persoalan). Inilah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar IMM dalam upaya membangun keadilan dan kesejahteraan. IMM perlu melakukan perjuangan moral politik nilai misalnya dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan mengontrol tindakan pemerintah dan masyarakat yang keluar dari nilai kebenaran dan keadilan. Dengan cara inilah IMM menjadi media yang akan melahirkan para negarawan. Upaya di atas tentu tidak mudah. Organisasi perlu melakukan konsolidasi gerakan, kristalisasi isu bersama, menjalin networking, dan mereformasi model perkaderan. Artinya, IMM berpandangan jauh ke depan,

tidak hanya memikirkan politik kepartaian yang mementingkan urusan jangka pendek.

II. Nama kegiatan

Kegiatan ini bernama Diklat Politik Nasional IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (DIKPOLNAS IMM) dengan tema **“Peran Rekonsiliasi Kebangsaan Dalam Meneguhkan Nilai Pancasila”**

III. Target dan tujuan kegiatan

1) Tujuan Kegiatan

- Terbinanya kader mentransformasikan perubahan sosial.

2) Target Kegiatan

- Menumbuhkan kesadaran akan tanggungjawab yang tinggi dalam mentransformasikan nilai-nilai perubahan serta memiliki kepekaan terhadap fenomena keummatan dan kebangsaan.
- Terciptanya kader yang mampu mengorganisir masyarakat dan mentransformasikan nilai-nilai perubahan untuk mewujudkan Baldatun Tayyibatul Wa Rabbul Ghafur.
- Terlahirkan pemimpin yang mampu menterjemahkan dan nilai-nilai intelektual yang progresif dalam gerakan sosial politik di masyarakat.

IV. Penyelenggara

Penyelenggaraan program Diklat Politik Nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DIKPOLNAS IMM) ini dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang

Malang dibawah naungan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)Jawa Timur.

V. Arah Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk membuka paradigma peserta tentang kondisi aktual tentang indonesia dari kacamata global maupun nasional terkait dinamika politik, hukum dan perkembangan demokrasi indonesia. Pelatihan dengan pemateri dari kalangan praktisi dan pengamat diharapkan mampu membuka paradigma peserta sehingga memahami posisi, tantangan dan tanggung-jawab sebagai intelektual, sebagai bekal lompatan dalam melakukan gerakan pencerahannya.

VI. Metode

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka metode yang akan digunakan dalam pelatihan ini diantaranya:

- Screening dan Pengujian Makalah
- Stadium General
- Ceramah dan diskusi
- Presentasi Makalah
- Seminar
- Penugasan
- PreTest dan Post Test

VII. Waktu dan Tempat

Kegiatan Diklat Politik Nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DIKPOLNAS IMM) rencana diadakan pada tanggal 04 s/d 08 Februari 2015 mengambil tempat dibalai Pelatihan Applesun Kaliwatu Kota Batu Jawa Timur.

VIII. Kepesertaan

Peserta Diklat Politik PC IMM Malang diikuti 30 Pimpinan Cabang IMM Jawa Timur dan undangan khusus dengan jumlah maksimal 50 Peserta.

❖ Persyaratan Umum Peserta:

- Telah menjadi kader IMM minimal 2 tahun.
- Memiliki wawasan tentang keilmuan, politik gerakan, dan kemuhammadiyahahan.
- Mengirimkan berkas persyaratan kepesertaan terakhir 25 Januari 2015.

❖ Persyaratan Khusus peserta:

- Mengisi formulir pendaftaran sebagai calon peserta Diklat Politik Nasional
- Melampirkan fotocopy syahadah dan atau surat keterangan telah mengikuti perkaderan.
- Membayar Sumbangan Wajib Peserta (SWP) sebesar Rp. 150.000,-
- Membayar Sumbangan Wajib Organisasi (SWP) sebesar Rp. 100.000,-
- Menyerahkan pas photo berwarna dengan ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar.
- Membawa surat mandat Pimpinan Cabang masing-masing.
- Membuat makalah sesuai dengan salah satu topik materi. Minimal 5 halaman dengan ukuran kertas A4, spasi 1.5, jenis huruf Times New Roman.

- Makalah harus karya pribadi dan dikirim ke alamat email dikpolnasmalang@gmail.com

- Pada saat screening dan presentasi buku referensi harus dibawa.

❖ Tahapan Penjaringan Peserta

- Pendaftaran dibuka sejak tanggal 15-26 Januari 2015.
- Hasil seleksi administrasi calon peserta DIKPOLNAS IMM akan diumumkan pada tanggal 28 Januari 2015.
- Calon peserta yang lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti screening oleh Tim Instruktrur wilayah Jatim sejak tanggal 1-2 Februari 2015 dan luar jatim pada tanggal 3 Februari 2015

❖ Contact Person Co. Koordinator Pelaksana (*Muhammad Bashiruddin*)

- 0857 3664 3994
- 0819 4538 0425

IX. Manual kegiatan

Terlampir

X. Panitia kegiatan

Terlampir

Malang, Januari 2015
Panitia Pelaksana
Diklat Politik Nasional
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Lampiran i

SUSUNAN ACARA
 DIKLAT POLITIK NASIONAL IMM
 “Peran Rekonsiliasi Kebangsaan Membangun Nilai Kedaulatan Pancasila”

Waktu	Materi	Keterangan
Hari Pertama / Rabu, 04 Februari 2015		
15.00-17.00	Registrasi	Panitia
17.00-18.00	Pembukaan <input type="checkbox"/> Pembacaan Ayat Suci Al-Quran <input type="checkbox"/> Menyanyikan Mars IMM <input type="checkbox"/> Sambutan Ketua Umum PC IMM <input type="checkbox"/> Sambutan Ketua Umum DPD IMM Jatim	IMM. Husni mubarok Master of Ceremony IMM. Yusuf Hamdani Abdi IMM. Najih Prasetyo
18.00-19.00	ISHOMA	Fasilitator
19.00-21.00	Studium Generale “Peran Rekonsiliasi Kebangsaan dalam meneguhkan Nilai Peradaban Pancasila”	ZULKIFLI HASAN (Ketua MPR RI)
21.00-22.00	Taaruf peserta	
22.00-24.00	Presentasi Makalah	MOT
24.00WIB	Istirahat Malam	All
Hari Kedua / Kamis, 05 Februari 2015		

08.00-11.00	<i>Materi i</i> TANTANGAN HUKUM DAN POLITIK KEBANGSAAN MENGHADAPI GLOBALISASI “Manifestasi perubahan budaya politik dan ekonomi Indonesia”	Bpk. Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI)
11.00-12.00	Focus Group Discussion	MOT
12.00-13.00	ISHOMA	All
13.00-15.00	<i>Materi ii</i> PEMBERDAYAAN EKONOMI POLITIK TERHADAP KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI DEMOKRASI INDONESIA “Menyikapi Imperium global dan kekuatan partai politik dalam perspektif demokrasi Indonesia”	Bpk. Tjatur Sapto Edi (Anggota DPR RI F-PAN)
15.00-19.00	Penugasan	Peserta
19.00-20.30	Presentasi Tugas	Instruktur
20.30-23.30	Pendalaman Materi dan Evaluasi	Instruktur
24.00	Istirahat	All
Hari ketiga / Jumat, 06 Februari 2015		
06.00-08.00	MCK	All
09.00-11.00	<i>Materi iii</i>	

	Politik Anggaran Dan Program Akselerasi Kesejahteraan Rakyat	Bpk. Eddy Rumpoko (Walikota Batu)
11.00-13.00	ISHOMA	All
13.00-15.00	<i>Materi iv</i> Rejuvenasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bagi Pemuda dalam Memperkokoh Kesatuan Bangsa	Ir. H. M. Ridwan Hisjam (Anggota DPR RI Komisi X)
15.00-16.00	Presentasi	MOT
18.00-19.30	<i>Materi v</i> Peran politik Strategis Muhammadiyah: Protret perpolitikan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaharuan	Muhadjir Effendy, M.AP (Rektor UNMUH Malang)
19.30-22.00	Focus Group Discussion	Instruktur
Hari keempat /Sabtu 07 Febuari 2015		
06.00-08.00	MCK	All
08.00-10.00	<i>Materi vi</i> Politik Pilkada dalam upaya Mengawal Suara Rakyat dan Menguatkan Demokrasi di Indonesia	Santoko Kunaryo, S.Pdi Ketua KPUD Kabupaten Malang
10.00-11.00	ISHOMA	All
13.00-15.00	<i>Materi vii</i> Militer dalam sistem politik Indonesia: peran militer sebagai stabilitator kebangsaan	Letkol Inf Riksani Gumay (DANDIM Malang Raya)

15.00-17.00	ISHO	All
18.00-21.00	Focus Group Discussion	Instruktur
21.00-23.00	Presentasi	Instruktur
23.30	Istirahat	All
Hari Kelima / Minggu 08 Febuari 2015		
06.00-08.00	MCK	All
08.00-10.00	<p style="text-align: center;"><i>Materi viii</i></p> <p>MANIFESTO GERAKAN KEMAHASISWAAN MENYIKAPI DINAMIKA POLITIK SOSIAL KEBANGSAAN KONTEMPORER</p> <p>“Penguatan Ideologi gerakan kemahasiswaan dalam Mewujudkan Eksistensi khittah perjuangan”</p>	<p>Ton Abdilla Has</p> <p>Cokro Wibowo Sumarsono</p>
10.00-12.00	Focus Group Discussion	Instruktur
12.00-13.00	ISHOMA	All
13.00-14.00	Rencana tindak lanjut	Peserta, MOT, Instruktur
14.00-15.00	Penutupan	All

Lampiran ii

SUSUNAN KEPANITIAAN
DIKLAT POLITIK NASIONAL IMM

“Peran Rekonsiliasi Kebangsaan dalam Meneguhkan Nilai Pancasila”

Penasehat	:	Najih Prasetyo, S.Hi <i>Ketua Umum DPD IMM Jatim</i>
Penanggung Jawab	:	Yusuf Hamdani Abdi <i>Ketua Umum PC IMM Malang Raya</i>
Koordinator Program	:	Muhammad Nabawi <i>Ketua Bidang Hikmah PC IMM Malang Raya</i>
Sekretaris program	:	Didik Wahyudi
Bendahara Program	:	Ayu Fahima Diniyahwati
Biro Administrasi (Rekrutmen, dan kesekretariatan)		
Koordinator	:	Muhammad Bashiruddin
Sekretaris	:	Agregat Nur Izzatillah
Biro Biro Pendidikan (pelaksanaan program, keinstrukturan, dan money)		
Koordinator	:	Ikhlasul Amal
Sekretaris	:	Deni Susanto
Biro Sarana & Prasarana (Home base, perpustakaan, modul, penerbitan)		
Koordinator	:	Prima Tahta Amrillah
Sekretaris	:	Soni Zakariya